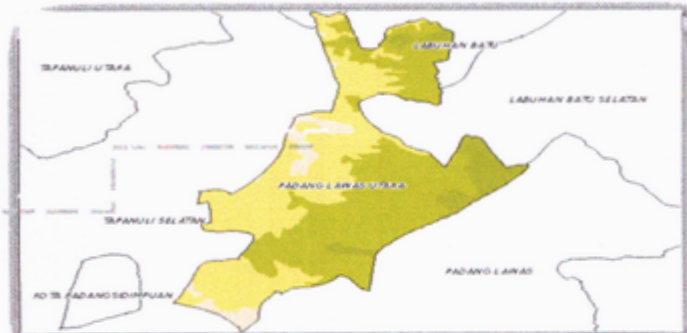




RENJA TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan Waktu dan kesempatan hingga terselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan memperhatikan seluruh kepentingan OPD. Rancangan Rencana kerja (Renja) bertujuan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, agar pelaksanaannya sesuai dengan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara. Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Rancangan Rencana kerja (Renja) Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, kebijakan, Program, dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Disadari bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan saran dan pendapat yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya pada tahun mendatang.

Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

Gunungtua, 31 Agustus 2023

**KEPALA DINAS KOPEASI UASAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



SAHRIZAL, SH
NIP. 19660222 198611 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I.	PENDAHULUAN.....	
	1.1 Latar Belakang.....	
	1.2 Landasan Hukum.....	
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	
	1.4 Sistematika Penulisan.....	
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
BAB III.	TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	
	3.2 Cascading Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026	
	3.3 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	
	3.4. Program dan Kegiatan.....	
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
BAB V.	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja (Renja) tahun 2024 adalah Dokumen Perencana OPD yang memuat kebijakan ,Program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat .

Rencana kerja tahun 2024 merupakan agenda peralihan pemerintahan daerah di wilayah kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan tahapan RPJMD Tahapan ke V (2024 2026) yang memuat isu-isu yang termasuk di dalamnya tentang pembahasan Penataan ruang terbuka hijau kota, pengembangan jalan lingkar, jalan poros desa jalan arteri, pengembangan jaringan telekomunikasi di lokasi strategis, pengembangan pembangunan jaringan listrik, perluasan jaringan transmisi, penambahan jaringan prasarana irigasi di kawasan pertanian serta didukung perluasan pembangunan drainase sekunder yang merupakan target dan sasaran pada RPJMD tahap V.

Oleh dengan hal tersebut rencana kerja OPD disesuaikan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing dengan terlebih dahulu melakukan pengelompokan program dan kegiatan yang pantas dan cocok untuk mendukung peningkatan kinerja masing-masing OPD dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk mengejar pencapaian target kinerja tersebut Dinas Kopearasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan harus melakukan penyusunan program dan kegiatan prioritas yang dapat mendorong pencapaian kinerja sesuai dengan target RPJMD Tahap V tersebut dengan juga memperhatikan kebijakan-kebijakan pembangunan skala nasional; propinsi dan daerah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan kabupaten Padang Lawas Utara merupakan suatu Dinas yang membantu Bupati di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembangunan seperti penataan struktur Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Pengembangan Sentra Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan yang potensial. Pembangunan di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan bertujuan Meningkatkan Ekonomi masyarakat melalui Pelatihan, Jaminan Sosial, Pemberdayaan dan Pengembangan.

Matriks program dan kegiatan harus juga mengikuti patron dan ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat dan propinsi agar prosedur dan mekanisme pekerjaan tidak menyalahi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan harus juga mendukung secara penuh program dan kegiatan yang akan didelegasikan oleh pemerintah pusat ke daerah sekaligus program dan kegiatan tersebut harus mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga ada keselarasan, kesinambungan dan harmonitas yang dipelihara.

Pada tahun 2024 rencana kegiatan yang menjadi target pelaksanaan kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi kegiatan :

1. Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi sebanyak 100 Orang.
2. Pelaksanaan Lembaga Pelatihan kerja Swasta di targetkan 1 Lembaga
3. Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota
4. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

5. Pengesahan peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 kab/Kota
6. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan target 5 Unit Usaha.
7. Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan ,Kemudahan Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan target 1 Dokumen
8. Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Satu Kab/Kota target 5 Unit Usaha
9. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya 1 Kab/Kota target 10 Unit Usaha
10. Pelatihan dan Pendidikan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Libntas Daerah Kab/Kota targetnya 20 Orang ,
11. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Lintas Dearah Kab/Kota Targertnya 3 Keluarga

Seterusnya adapauln prinsip-prinsip yang dianut dala setiap penyusunan rancangan awal rencana kerja antara lain :

1. Berpedoman pada renstra opd dan mengacu pada rancangan awal rkpd;
2. Penyusunan rencana kerja dinas pertanian merupakan rangkaian kegiatan simultan dengan penyusunan rkpd, serta merupakan bagian dari kegiatan penyusunan apbd;
3. Substansi rancangan renja dinas pertanian memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan pilihan opd terhadap renstra, evaluasi pelaksanaan renja opd tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta sub

kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju;

4. Rusmusna program/kegiatan/sub kegiatan di dalam renja opd didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing opd;
5. OPD Propinsi melakukan pengkajian terhadap usulan program/kegiatan yang disampaikan opd terkait dari kabupaten/kota yang ada di propinsi, selanjutnya dibahas bersama opd-opd kabupaten/kota tersebut dalam forum opd propinsi untuk menentukan kesepakatan prioritas terhadap program/kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD propinsi dan atau/APBN.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Rencana kerja) OPD Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional;(Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 37 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten padang lawas utara di propinsi sumetara utara;(Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007);
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentant pemerintahan daerah (lembaranan Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam peraturan peerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klassifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangnan dan keuangan daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klassifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahu 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klassifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
8. Peraturan daerah kabupaten padang lawas utara nomor 4 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten padang lawas utara tahun 2013 nomor 440, tambahan lembaran daerah kabupaten padang lawas utara nomor 16).
9. Peraturan daerah kabupaten padang lawas utara nomor 08 tahun 2021 tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Kerja (Rencana kerja) OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dengan maksud sebagai bahan acuan dalam melaksanakan Program Kegiatan yang menyangkut bidang Koperasi,UKM dan Ketenagakerjaan selama satu tahun berjalan dengan tujuan agar

Program Kegiatan dapat terencana, terarah dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Maksud dari disusunnya suatu Rencana kerja adalah :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Diskopukmnaker
- Menjadi Pedoman Penyusunan Sakip
- Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA PPAS, RAPBD dan APBD;
- Menjadi Pedoman Penyusunan Sakip
- Mengetahui Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 Diskopukmnaker
- Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pilihan opd;
- Insruen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat;
- Dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Tujuan

Tujuan Penyusunan Ranwal Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

- Untuk menyeragamkan langkah Perencanaan Pembangunan yang akan dilakukan di Daerah yang didasarkan pada perencanaan pusat, propinsi dan daerah terkait dengan Tupoksi OPD yang di emban.
- Memberikan arah,tujuan,sasaran strategis kebijakan,Program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan kewenagakerjaan
- Tersedianaya arah kebijakan teknis di Bidang Koperadsi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- Untuk menilai dan melihat Kesinambungan Program OPD terhadap Kesejahteraan Rakyat.

- Tersusunnya Program dan Kegiatan Di lingkungan Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan satu tahu kedaepan untuk kemedian di uraikan kedalam RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- Sebagai Dokumen dasar bagi OPD terhadap tindakan Pengawasan dan sekaligus alat Monitor dan Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Negara dan Daerah terhadap Perencanaan Kegiatan dan Program serta Implementasinya di Masyarakat.
- Sebagai bahan dasar bagi OPD untuk menggambarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan di masyarakat dan sebagai bahan masukan untuk OPD dalam menyempurnakan pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.
- Tersedianya Rumusan Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dalam pengelolaan pemerintah yang meru[akan indikator Program yang tertuang dan sebagai tolak ukur pencapaian Kinerja Dinas Kopesi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Ranwal Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 5 (Lima) Bab dan memuat beberapa Sub Bab antara lain :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DiSKOPUKMNAKER Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Diskopukmnaker
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi diskopukmnaker
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Cascading Kinerja Dinas Koperasi Ukm dan Ketenagakerjaan
- 3.3 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELKSANAAN RENJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja DisKopUkmNaker Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 didasarkan pada Renstra DisKopUkmNaker Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 Untuk Mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Penilaian terhadap kondisi organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan analisis SWOT, yaitu analisis dengan melibatkan seluruh Stake Holders melalui diskusi dua arah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam segi pelayanan, telah mengikuti dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal terhadap penanganan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Analisis terhadap kondisi internal dan eksternal yang pada dalam Perkembangan Koperasi , UKM dan Ketenagakerjaan . Dinas

No	Saarn	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi												Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja Capaian Kinerja yang di Evaluasi (2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja Capaian Kinerja yang di Evaluasi (2023)																
					K	R	P	D	K	R	P	D	K	R	P	D	K	R	P	D	K	R	P	D					
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANA																													
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN																													
1	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Terampil	705	HUBUNGAN INDUSTRIAL	PENETAPAN UMKAB					402.594.400					0				-								0%	0%	KOPERASI USAHA	
11		07.05.1	Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk	Jumlah Dokumen Upah Minimum Kabupaten	1	402.594.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
1.1.1		07.05.1.8	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	402.594.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
Rata- Rata Capaian Kinerja																													
Predikat Kinerja																													
2	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Terampil	207	Program Tenaga Kerja	INFORMASI PASAR KERJA					-					0				-								0%	0%	KOPERASI USAHA	
21		2.07.1	Pengelola Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Yang Disebarluaskan Melalui Media Cetak	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
Rata- Rata Capaian Kinerja																													
Predikat Kinerja																													
3	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Terampil	2.07.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen transmigrasi					-					0				-								0%	0%	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	
31		2.07.1	Penataan Penyebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen transmigrasi	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
Rata- Rata Capaian Kinerja																													
Predikat Kinerja																													
4	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Dengan Indikator Pembangunan Vokasi Perseentase Penduduk	2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	terpenuhinya pencari kerja yang produktif					539.593.400					124.034.000				318.668.000	0	0	0	0	0	0	0	442.702.000	21,43%	8,2%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja Capaian Kinerja yang di Evaluasi (2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RP/MD 2023	RP/MD 2023	RP/MD 2023	RP/MD 2023		I				II				III		IV		K	Rp	K	Rp			
					K	R	K	R		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	F	K	F	K							
5-3-5		2-17.01.4.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3	20.597.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	25,0%	
5-3-6		2-17.01.4.14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD					100	111.270.000	10	29.424.400	20	55.493.400	0	0	0	0	0	0	0	0	30	84.917.800	30,0%	76,3%		
5-4		2-17.01.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38	76.410.000	0	17262000	0	2.370.000	0	#	0	#	0	0	0	0	0	19.632.000	0,0%	17,5%		
5-4-1		2-17.01.6.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibiayarkan Pakajnya					4	56.000.000	0	17.262.000	0	2.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.632.000	0,0%	35,1%		
5-4-2		2-17.01.6.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					34	20.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0%	0,0%		
5-5		2-17.01.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%		
5-5-1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0%	0,0%		
5-6		2-17.01.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25	143.293.400	4	22695502	4	26.950.320	0	#	0	#	8	49.645.822	22,2%	37,9%						
5-6-1		2-17.01.5.6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	1.200.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0,0%	50,0%		
5-6-2		2-17.01.5.7	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	49.440.000	2	7.521.402	1	3.873.720	0	0	0	0	3	11.395.122	25,0%	23,0%						
5-6-3		2-17.01.5.8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	92.653.400	2	14.574.100	3	23.076.600	0	0	0	0	5	37.650.700	41,7%	40,6%						
5-7		2-17.01.1	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja					4	28.255.300	0	14487100	2	10.663.100	0	#	0	#	2	25.150.200	50,0%	91,0%						

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Realisasi		Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja Capaian Kinerja yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RP/MD 2023 (Akhir Periode un 2023)	RP/MD 2023 (akhir periode un 2023)	RP/MD 2023 (akhir periode un 2023)	RP/MD 2023 (akhir periode un 2023)		I				II				III		IV		
					K	P	K	P		K	P	K	P	K	P	K	P	K	P			
5.7.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	17.502.200	0	14.487.100	0									14.487.100	0,0%	82,8%		
5.7.2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktitsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktitsar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktitsar Realisasi Kinerja SKPD	2	10.753.100	0	0	2	10.663.100	0	0	0	0	0	0	0	10.663.100	100,0%	99,2%		
Rata-Rata Capaian Kinerja																						
Predikat Kinerja																						
6	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Terampil	2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Terlaksananya Pengawasan Koperasi		189.434.000	0	0	0	0	16.200.000	0	#	0	#	0	0	16.200.000	0,00%	8,55%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAK ERJAAN	
6.1		2.17.05.1	Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	20	189.434.000	0	0	0	0	16.200.000	0	#	0	#	0	0	16.200.000	0,0%	8,6%		
6.1.1		2.17.05.1.6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20	189.434.000	0	0	0	0	16.200.000	0	0	0	0	0	0	16.200.000	0,0%	8,6%		
Rata-Rata Capaian Kinerja																						
Predikat Kinerja																						
7	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Terampil	2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Tumbuhnya koperasi Baru		57.501.800	0	0	3	56.501.800	0	#	0	#	3	-	100%	98%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN			
7.1		2.17.06.1	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Koperasi Melalui GAMASKOP	3	57.501.800	0	0	3	56.501.800	0	#	0	#	3	56.501.800	100,0%	98,3%				

No	Saaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja Capaian Kinerja yang di Evaluasi (2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RPJMD 2023-2024	RPJMD 2023-2024		I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																						K	P	K	P	
7.1.1		2.17.06.1.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			3	57.501.800	0	0	3	56.501.800	0	0	0	0	3	56.501.800	100,0%	98,3%						
Rata-Rata Capaian Kinerja																										
Predikat Kinerja																										
8	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Terampil	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECIL DAN USAHA MIKRO(UMKM)	Persentase pemberdayaa usaha menengah usaha kecil danusaha mikro (UMKM)				185.095.400	0	0	3	56.596.100	#	#				56.596.100	33,33%	33,59%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAK ERJAAN					
8.1		2.17.07.1	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendidikan	UMKM Go Digital			4	185.095.400	0	0	3	56.596.100	0	#	0	#	3	56.596.100	33,33%	33,59%						
8.1.1			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0,0%	0,0%						
8.1.2		2.17.07.1.9	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			1	128.936.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0,0%	0,0%						
8.1.3		2.17.07.1.10	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			3	56.159.400	0	0	3	56.596.100	0	0	0	0	3	56.596.100	100,0%	100,8%						
Rata-Rata Capaian Kinerja																										
Predikat Kinerja																										
9	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Terampil	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	UMKM NAIK KELAS				-		0		-	0	0	0	0	-	-	0%	0%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
9.1		2.17.08.1	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil			0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	0%	0%						

[illegible]

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

1.1. Kekuatan (strengths)

- a. Tersedianya pranata hukum (Perda dan Surat Keputusan);
- b. Tersedianya Anggaran;
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia.

1.2. Kelemahan (weaknesses)

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung
- b. System Pengendalian dalam Pengawasan Badan Hukum ;
- c. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- d. Belum sepenuhnya Program / Kegiatan yang dilaksanakan mengacu Kepada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan

2. Analisis Lingkungan Eksternal

2.1. Kesempatan (opportunities)

- a. Adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- b. Keinginan pelaku Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Usahanya;

2.2. Ancaman (threats)

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- b. Kurangnya Kemampuan Masyarakat dalam berdaya saing
- c. Adanya kebijakan teknis dari lintas sektoral yang mempengaruhi Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan

3. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

- a. Adanya motivasi yang tinggi dari SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk meningkatkan kualitas Koperasi,UKM dan Ketenagakerjaan dengan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- b. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait;

- c. Adanya system yang mendukung dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi Usaha kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Menengah
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakaerjaan
4. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
5. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan mempunyai Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan

Menenah dan Ketenagakerjaan. Untuk Menyelenggarakan Fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas Melaksanakan Kewenangan di Bidang koperasi,UKM dan Ketenagakerjaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara. Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang lawas Utara. Program dan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rancanag Awal Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah.

Telaahan terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja dicapai oleh OPD dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/ksegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan RKPD;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk

memudahkan analisis;

4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas OPD sudah termuat dalam rancangan RKPD.
5. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
6. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, telah dilakukan langkah berikut:
 - a. Mengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;
 - b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra OPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
 - c. Memberikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja OPD.
8. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), telah dilakukan langkah berikut:
 - a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam renja RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, melakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra OPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
 - b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
 - c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan

mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan akhir RKPD, target capaian Renstra OPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;

- d. Memberikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja OPD.
9. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap renja RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

TABEL T-c.2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun 2023

Kabupaten Padang Lawas Utara

N o	Rancangan Awal o RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Cat ata n Pe nti ng
	Program/Kegiat an	Lokas i	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Pagu Indikat if (Rp.)	Program Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Kebutuh an Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				999.94 3.000,-	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				999.943 .000,-		
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	KAB. PALU TA	Persentase Pemenuhan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %	999.94 3.000,-	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	KA B. PA LU TA	Persentase Pemenuhan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %	999.943 1000,-		
I	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				

i	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	KAB. PALU TA	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun N	100 oran g	999.94 3.000, 0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	KA B. PA LU TA	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun N	100 oran g	990.943 .000.00 0,-	
ii	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	KAB. PALU TA	Jumlah Kesepakatan/Koordi nasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lem baga		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	KA B. PA LU TA	Jumlah Kesepakatan/Koordi nasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lem baga		
I	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Unit		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Unit		
I	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	KAB. PALU TA	Jumlah Lembaga Kerja yang Dibina	1 Lem baga		Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	KA B. PA LU TA	Jumlah Lembaga Kerja yang Dibina	1 Lem baga		

I	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	KAB. PALU TA				Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	KA B. PA LU TA			
I	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	KAB. PALU TA	Jumlah Daya Lembaga Kerja Terintegrasi	Sumber Perizinan Pelatihan Secara Terintegrasi	1 Perizinan	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	KA B. PA LU TA	Jumlah Daya Lembaga Kerja Terintegrasi	Sumber Perizinan Pelatihan Secara Terintegrasi	1 Perizinan
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	KAB. PALU TA	Persentase Pemenuhan Penempatan Tenaga Kerja	0	Program Penempatan Tenaga Kerja	KA B. PA LU TA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	0		
I	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota									
i	Penyediaan Sumber daya Pelayanan antar Kerja	KAB. PALU TA	Jumlah Pelayanan Kerja Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain	SDM 1 Oran	0	Penyediaan Sumber daya Pelayanan antar Kerja	KA B. PA LU TA	Jumlah Pelayanan Kerja Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain	SDM 1 Oran	0

2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non Afiliasi	KAB. PALU TA	Jumlah pengusaha dan serikat pekerja yang di verifikasi	Asosiasi dan asosiasi dan serikat at Pekerja rja	0	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non Afiliasi	KA B. PA LU TA	Jumlah pengusaha dan serikat pekerja yang di verifikasi	Asosiasi dan asosiasi dan serikat at Pekerja rja	0	
3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	KAB. PALU TA	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas Pekerja	organ g	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	KA B. PA LU TA	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas Pekerja	organ g	0	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	70,00%	3.222.389.850,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	3.222.389.850,-	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		jumlah dokumen	2	32.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		jumlah dokumen	2	32.000.000	

Daerah					Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. PALU TA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.751.100.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KA B. PA LU TA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.751.100.000
2	koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB. PALU TA	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KA B. PA LU TA	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
3	koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	KAB. PALU TA	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil DPA - Penyusunan Dokumen d- SKPD	2 Dokumen		koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	KA B. PA LU TA	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil DPA - Penyusunan Dokumen d- SKPD	2 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.753.100,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KA B. PA LU TA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.753.100,-

I i	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	Dokumen	2.287.608.650,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	Dokumen	2.287.608.650,-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB PALU TA	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	216 OB	2.158.833.650,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KA B. PA LU TA	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	216 OB	2.158.833.650,-	
2	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Akhir dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	125.760.000,-	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	KA B. PA LU TA	Jumlah Laporan Akhir dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	125.760.000,-	
3	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKEUANGAN Akhir tahun SKPD	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Akhir dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.015.100,-	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKEUANGAN Akhir tahun SKPD	KA B. PA LU TA	Jumlah Laporan Akhir dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.015.100,-	
I i	Administrasi Kepegawaian i Perangkat Daerah		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang	Orang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang	orang		

		mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KAB. PALU TA	Jumlah Paket 1 Pakaian Dinas Atribut t Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KA B. PA LU TA	Jumlah Paket 1 Pakaian Dinas Atribut t Kelengkapannya		
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB. PALU TA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KA B. PA LU TA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	
1 v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB. PALU TA	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KA B. PA LU TA	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	155.577.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB. PALU TA	Jumlah Paket 1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.706.800,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KA B. PA LU TA	Jumlah Paket 1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.706.800,-	
2	Penyediaan Peralatan dan	KAB. PALU TA	Jumlah Paket 2 Peralatan dan Perlengkapan	39.997.800,-	Penyediaan Peralatan dan	KA B. PA	Jumlah Paket 2 Peralatan dan Perlengkapan	39.997.800,-	

	Perlengkapan Kantor		Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor	LU TA	Kantor yang Disediakan			
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	6.773.000,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	6.773.000,-	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB. PALU TA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	27.993.600,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KA B. PA LU TA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	27.993.600,-	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB. PALU TA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.309.000,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KA B. PA LU TA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.309.000,-	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.597.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.597.000,-	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.200.800,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KA B. PA LU TA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.200.800,-	

V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. PALU TA	Percentase pengadaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	1	Kegi	25.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KA B. PA LU TA	Percentase pengadaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	1	Kegi	25.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB. PALU TA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Disediakan	1	Unit	5.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KA B. PA LU TA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Disediakan	1	Unit	5.000.000	
2	Pengadaan Mebel	KAB. PALU TA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	5.000.000	Pengadaan Mebel	KA B. PA LU TA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	5.000.000	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PALU TA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KA B. PA LU TA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	15.000.000	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. PALU TA	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4	Kegi	266.640.000,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KA B. PA LU TA	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4	Kegi	266.640.000,-	

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. PALU TA	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	Laporan Jasa	1 Lapo ran	1.200. 000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KA B. PA LU TA	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	Laporan Jasa	1 Lapo ran	1.200.0 00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. PALU TA	Jumlah Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Jasa Lapo ran	12 Lapo ran	49.440 .000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KA B. PA LU TA	Jumlah Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Jasa Lapo ran	12 Lapo ran	49.440. 000,-	
	Penyediaan Jasa Kawat /Faksimil i/Internet/TV Berlangganan	KAB. PALU TA	Jumlah Pemakaian Internet	Lapo ran	12 Lapo ran		Penyediaan Jasa Kawat /Faksimil i/Internet/TV Berlangganan	KA B. PA LU TA	Jumlah Pemakaian Internet	Lapo ran	12 Lapo ran		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. PALU TA	Jumlah Penyediaan Pelayanan Kantor Disediakan	Laporan Jasa Umum yang	12 Lapo ran	216.00 0.000, 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KA B. PA LU TA	Jumlah Penyediaan Pelayanan Kantor Disediakan	Laporan Jasa Umum yang	12 Lapo ran	216.000 .000,0	
V	Pemeliharaan i Barang Milik i Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Kegi atan	74.690 .000,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Kegi atan	74.690. 000			

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. PALU TA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	54.280.000,0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KA B. PA LU TA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	54.280.000,-	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PALU TA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	20.410.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KA B. PA LU TA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	20.410.000,-	
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KAB. PALU TA	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitas	1 Unit		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KA B. PA LU TA	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitas	1 Unit		
4	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Pemenuhan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Unit Usaha a	0	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Pemenuhan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Unit Usaha a	0	
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,	KAB. PALU TA		0		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,	KA B. PA LU		0		

Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya a dalam Daerah Kabupaten / Kota					Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya a dalam Daerah Kabupaten / Kota	TA				
I Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,kopera si simpan pinjam/unitsim pan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya a dalam daerah kabupaten kota	KAB. PALU TA	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan ,kesehatan,kemandir ian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	10 Unit Usaha	0	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,kopera si simpan pinjam/unitsim pan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya a dalam daerah kabupaten kota	KA B. PA LU TA	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan ,kesehatan,kemandir ian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	10 Unit Usaha	0	
ii Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	KAB. PALU TA	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang- undangan kewenangan kabupaten/kota	5 Unit Usaha	0	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	KA B. PA LU TA	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang- undangan kewenangan kabupaten/kota	5 Unit Usaha	0	

5	Program Penilaian Kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase Pemenuhan Penilaian Kesehatan ksp/usp Koperasi	Unit Usaha	0	Program Penilaian Kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase Pemenuhan Penilaian Kesehatan ksp/usp Koperasi	0	
1	Penilaian Kesehatan koperasi si pan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah kean ggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a	Jumlah penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam/ Unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	0	Penilaian Kesehatan koperasi si pan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah kean ggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a	Jumlah penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam/ Unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	0		
1	Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	0	Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	0		
ii	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	0	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	0		
6	PROGRAM	Persentase	Oran	199.98	Persentase	Oran	199.984	

PENDIDIKAN dan latihan perkeroperasian		PENDIDIKAN dan latihan perkeroperasian	g	4.800		PENDIDIKAN dan latihan perkeroperasian	g	.800	
1	Pendidikan dan latihan perkeroperasian bagi koperasi yang wilayah Lintas daerah Kab/ Kota dalam (satu)Dearah Provinsi	KAB. PALU dan Jumlah Pendidikan dan latihan perkeroperasian bagi koperasi yang wilayah Lintas daerah Kab/ Kota dalam (satu)Dearah Provinsi				KA B. PA LU TA dan Jumlah Pendidikan dan latihan perkeroperasian bagi koperasi yang wilayah Lintas daerah Kab/ Kota dalam (satu)Dearah Provinsi			
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkeroperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	KAB. PALU TA Jumlah SDM Yang memahami Pengetahuan Perkeroperasian	20 oran g	199.98 4.800		KA B. PA LU TA Jumlah SDM Yang memahami Pengetahuan Perkeroperasian	20 oran g	199.984 .800	
7	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	KAB. PALU TA Persentase Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	3 Kelu arga	50.000 .000,-	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	KA B. PA LU TA Persentase Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	3 Kelu arga	50.000. 000,-	
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanny	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanny				

a dalam Dearah Kabupaten/Kota	dalam Dearah Kabupaten/Kota			a dalam Dearah Kabupaten/Kota				
I Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan Tarif Hidup Keluaraga Melalui Kehidupan Berkoperasian dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	KAB. PALU TA Jumlah yang penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Taraf Hidup Keluaraga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan pengembangan Ekonomi lainnya	3 Kelu arga	50.000 .000,-	Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan Tarif Hidup Keluaraga Melalui Kehidupan Berkoperasian dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	KA B. PA LU TA Jumlah yang penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Taraf Hidup Keluaraga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan pengembangan Ekonomi lainnya	3 Kelu arga	50.000. 000,-	
8 Program Pemberdayaan Usaha Menengah ,Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM)	KAB. PALU TA Jumlah SDM yYang Memahami penetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		50.000 .000,-	Program Pemberdayaan Usaha Menengah ,Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM)	KA B. PA LU TA Jumlah SDM yYang Memahami penetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		50.000. 000,-	
I Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Ke mitraan,Kemu dahan	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM)		50.000 .000,-	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Ke mitraan,Kemu dahan	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM)		50.000. 000,-	

Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan				Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan					
I Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KAB. PALU TA	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1 Dok	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KA B. PA LU TA	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1 Dok		
ii Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	KAB. PALU TA	Data potensi dan pengembangan Usaha Mikro	2 Unit Usaha	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	KA B. PA LU TA	Data potensi dan pengembangan Usaha Mikro	2 Unit Usaha		
iii Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan	KAB. PALU TA	Jumlah unit usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	10 Orang	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan	KA B. PA LU TA	Jumlah unit usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	10 Orang	50.000.000,-	

	Kewirausahaan					Kewirausahaan					
9	Program Pengembangan UMKM		<i>Persentase</i> <i>Pemenuhan</i> <i>Pengembangan</i> <i>UMKM</i>	Oran g	118.38 5.200,-	<i>Program</i> <i>Pengembangan</i> <i>UMKM</i>		<i>Persentase</i> <i>Pemenuhan</i> <i>Pengembangan</i> <i>UMKM</i>	oran g	118.385 .200,-	
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Slaka Usaha Menjadi Usaha Kecil	KAB. PALU TA	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Slaka Usaha Menjadi Usaha Kecil			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Slaka Usaha Menjadi Usaha Kecil	KA B. PA LU TA	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Slaka Usaha Menjadi Usaha Kecil			
i	Penumbuhan dan Pengembangan n Kewirausahaan	KAB. PALU TA	Jumlah yang di fasilitasi	10 Unt Usah a	118.38 5.200	Penumbuhan dan Pengembangan n Kewirausahaan	KA B. PA LU TA	Jumlah yang di fasilitasi	10 Unt Usah a	118.385 .200	
JUMLAH					4.222.332.850	JUMLAH				4.222.332.850,	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun yang langsung ditujukan kepada Dinas Pertanian dalam bentuk proposal maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD kabupaten dari pelaksanaan hasil musrenbang kecamatan.

Usulan rencana pembangunan tanaman pangan dan perkebunan mengacu pada system bottom up, proses untuk memperoleh usulan dari pemangku kepentingan melalui identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diajukan ke desa untuk diverifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi usulan prioritas desa.

Selanjutnya usulan diajukan ke tingkat kecamatan untuk dikaji melalui musrenbang kecamatan, hasil musrenbang kecamatan menjadi usulan program/kegiatan dan diajukan ke Bappeda untuk dikaji melalui musrenbang kabupaten.

Hasil musrenbang kabupaten tidak seluruhnya bias disetujui karena banyaknya usulan kegiatan dan keterbatasan anggaran daerah untuk mendanai program/kegiatan. Oleh karena itu usulan prioritas kecamatan dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk disinkronkan dengan renstra OPD, RPJMD dan program/kegiatan baik dari propinsi dan pusat menjadi rencana kerja tahunan OPD.

Tabel : Usulan Program dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Padang Lawas Utara terlampir :`

USULAN MASYRAKAT

NO	USULAN	LOKASI	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			

USULAN RESES (POKIR)

NO	USULAN	LOKASI	JUMLAH	DPR PENGUSUL
1	Kursus Pelatihan Lapangan Kerja	Desa pasar Pinang Kecamatan Portibi, Kab. Padang Laas Utara		Samsul BAHRI Daulay, s, pd

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Dimana tahun 2024 merupakan tahun awal tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau tahapan periode akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju.
4. Mewujudkan Keberkelanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta pelayanan yang prima.
2. Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatnya Infrastruktur Dasar.
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan untuk mengetahui isu strategis, prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, dari tujuan dan sasaran tersebut Dinas Kopretasi Usaha Kecil dan Menengah mengacu kepada Tujuan 1 "Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih" dengan sasaran 1 "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima, dengan demikian Tujuan dan sasaran Bapelitbangda diuraikan pada tabel berikut :

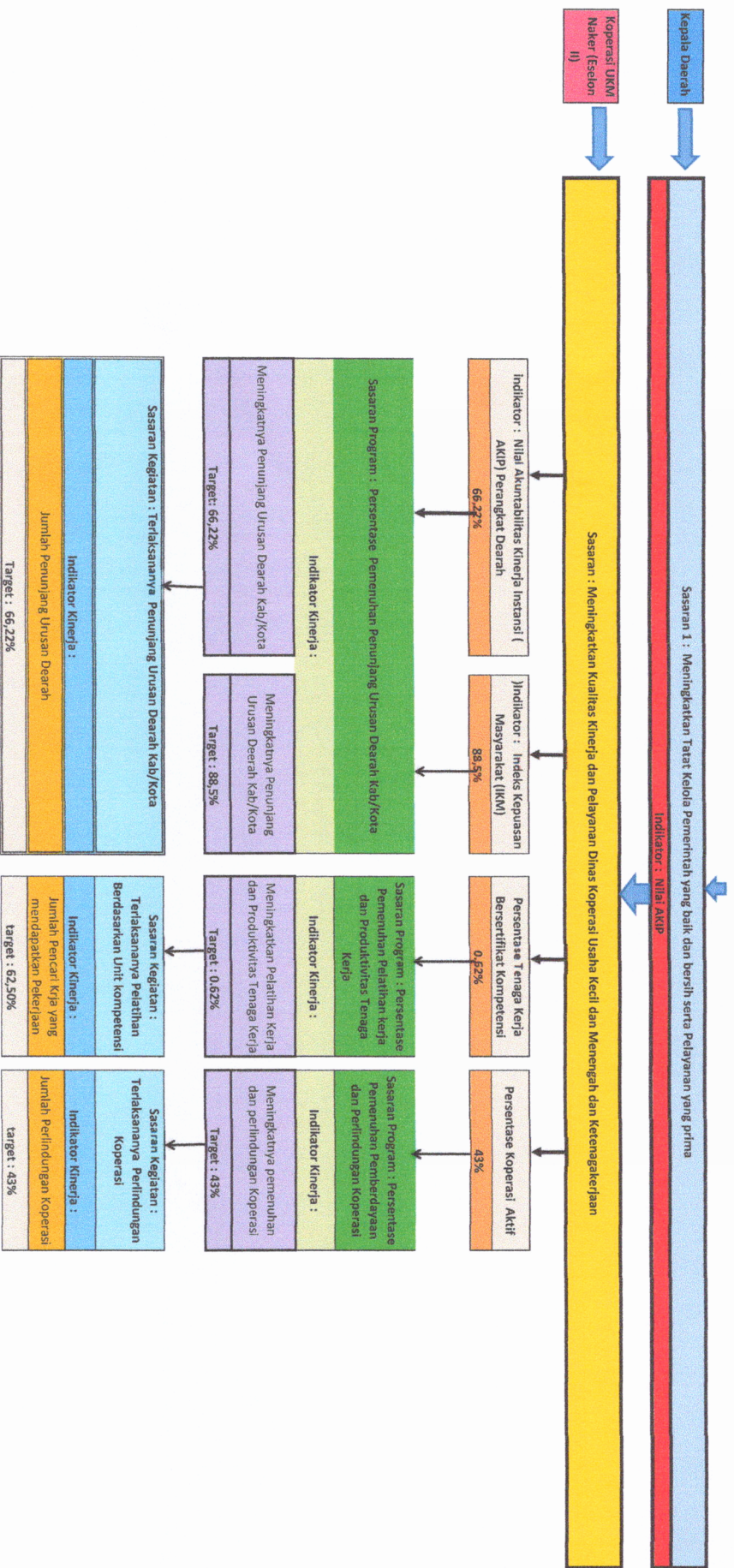
Tabel 3.1: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET		
				2021	2022	2023
1	2	3	4			
	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam upaya Peningkatan Kualitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan ketenagakerjaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	66,22%	71,22%	76,22%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5%	90,5%	90,5%
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,62 %	1%	51%
		Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	43 %	48%	53 %

3.2 Cascading Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

CASCADING DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN



3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Kebijakan Nasional tertuang di dalam RPJMN, dan juga dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024-2026 Kabupaten Padang Lawas Utara Dimana Tema RKP Pemerintah Tahun 2024- 2026 Dengan prioritas yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah ang baik dan bersih serta pelayanan yang prima
2. Meningkatnya Kulaitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
3. Meninfkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
4. Meningkatnya Infrastruktur Dasar
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kemudian disinkronkan dengan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara **“Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat Pasca Pandemi Covid 19, Menuju Sumatera Utara Bermartabat”** dimana Prioritas Pembangunan daerah provinsi Tahun 2023 difokuskan kepada :

1. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan;
3. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan Layanan Kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata;

Dalam prioritas pembangunan daerah provinsi Diskopukmnaker difokuskan pada nomor 1 yaitu Peningkatan Kesemapatan Keja dan berusaha melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Untuk arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara dan RKPD

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023, dengan Tema **“Peningkatan Perekonomian dan Kesehatan Masyarakat Menuju Padang Lawas Utara Sejahtera”** dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas Utara difokuskan pada :

1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah
5. Peningkatn Nilai Tambah Hasil Pertanian
6. Peningkatan Daya Dukung daerah dalam Menciptakan Peluang Investasi
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

3.4 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan maka program yang akan dilakukan adalah :

❖ Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP
6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
7. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
9. Program Perkembangan UMKM
10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan usaha Mikro UMKM

❖ Kegiatan

1. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasai Kinerja Perangkat Dearah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Peangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Deerah
5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah
6. Pemeliharaan barang Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
9. Penyedia Sumber daya pelayanan antar kerja
10. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
11. Pengesahan Peraturan Perusahaan pendaftaran Perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya (satu) Dearah Kabupaten Kota
12. Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
13. Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Dearah kabupaten/Kota
14. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota
15. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam kabupaten/Kota
16. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dukungan Melalui Pendataan,Kemitaan,Kemudahan Perjanjian,Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan
17. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAMAIAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU BEKANGA TAHUN 2025		PEANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WABUP YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.234.398.097,00							4.394.445.635,00	
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						1.005.000.000,00							1.003.000.000,00	
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pemenuhan pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-			100 Person	991.000.000,00						-	991.000.000,00	
2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Berdasarkan Klasiter Kompetensi	-			100 Orang	990.000.000,00						-	990.000.000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.01.01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klasiter Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				100 Orang	990.000.000,00	Kab. Padang Luhung Utara, Semua Kecamatan, Semua KeldDessa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatla n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	-		990.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-					1.000.000,00						-	1.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.02.01		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	1.000.000,00	Kab. Padang Luhung Utara, Semua Kecamatan, Semua KeldDessa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatla n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pemenuhan Tempatan Tenaga Kerja	-			50 Person	4.000.000,00						-	6.000.000,00	
2.07.04.2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan antar lintas Di daerah Kabupaten/Kota	-			1 Orang	3.000.000,00						-	6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.04.2.01.01		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Meksakan Pengawasan Peraturan Perusahaan yang Terait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				8 Perusahaan	2.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat an Pertumbu han Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.06.2.01.02	Pendataan Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama					8 Perusahaan	2.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat an Pertumbu han Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.06.2.01.03	Penyeleenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PPK, Struktur Staa Upah, dan LKS Biarai dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat an Pertumbu han Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	-		4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.06.2.02	Pencapaian dan Penyelesaian Pereselsihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Pencapaian dan penyelesaian pereselsihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupa perusahaan di daerah kabupaten/kota					2 Pekara	2.000.000,00			-	Peningkat an Pertumbu han Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	-		2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.06.2.02.01	Pencapaian Perselsihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Bersifat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Perselsihan yang Dicegah					2 Pekara	2.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat an Pertumbu han Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	-		2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.06.2.02.03	Penyeleenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
		Jumlah Asosiasi/Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi					0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat an Pertumbu han Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.06.2.02.05	Peningkatan Palaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
		Tindakannya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					0 Orang	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat an Pertumbu han Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				216 Orang/bulan	2.173.531.317,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi			2.333.578.855,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	145.560.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
2.17.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Kegiatan	2.000.000,00			-	Peningkatan Perumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Attribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Attribut Kelengkapan					1 Paket	1.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					1 Orang	1.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	-			7 Kegiatan	186.186.700,00			-	Peningkatan Perumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi			178.178.280,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2022	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENCANA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENOMBAHAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusikan				12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perilaku Ekonomi Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KEcil DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didistribusikan				12 Laporan	216.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perilaku Ekonomi Masyarakat	-		216.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KEcil DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.01.2.09	Pembinaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Kegiatan	37.000.000,00			-	Peningkatan Perilaku Ekonomi Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KEcil DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pembinaan, Bantu Pembinaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan dan diberikan Pajak dan Perizinan				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perilaku Ekonomi Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KEcil DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.01.2.09.06	Pembinaan Perbaikan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan				4 Unit	10.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perilaku Ekonomi Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KEcil DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.01.2.09.09	Pembinaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didistribusikan dan Diperbaiki				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perilaku Ekonomi Masyarakat	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KEcil DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
2.	2.17.80	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemenuhan Anggaran dan Pemasukan Koperasi	-			60 Persen	4.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENOMBAHAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		14	15	16	17				
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2.17.03.2.01	Pengawasan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi/ yang Wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemetaan dan Pengawasan Koperasi/ Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/ yang Wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	-			15 Unit usaha	4.000.000,00			-	Peningkatan Peran Ekonomi Induk Pembelian Ekonomi	-			4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN			
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Koperasi, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akutabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Diusulkan Pengawasan Koperasi, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akutabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Unit Usaha	2.000.000,00	Kab. Pading Lewas Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Peran Ekonomi Induk Pembelian Ekonomi	-			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN			
	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Diusulkan Pemeriksaan Terhadap Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	2.000.000,00	Kab. Pading Lewas Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Peran Ekonomi Induk Pembelian Ekonomi	-			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN			
3.	2.17.04	PROGRAM PENJAJAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Pemenuhan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-			60 Persen	4.000.000,00						-		4.000.000,00				
	2.17.04.2.01	Pemetaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/ yang Wilayah keanggotaannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	-			5 Unit usaha	4.000.000,00	Kab. Pading Lewas Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Peran Ekonomi Induk Pembelian Ekonomi	-			4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN			
	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Diusulkan Penilaian Kesehatan				5 Unit Usaha	2.000.000,00	Kab. Pading Lewas Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Peran Ekonomi Induk Pembelian Ekonomi	-			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN			
	2.17.04.2.01.02	Pengawasan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Diusulkan Pengawasan Kesehatan				5 Unit Usaha	2.000.000,00	Kab. Pading Lewas Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Peran Ekonomi Induk Pembelian Ekonomi	-			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN			
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pemenuhan Pondasi dan Latihan Perkoperasian	-			65 Persen	201.968.796,00						-		201.968.796,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRAT OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRAT TAHUN 2022	PENCAPAIAN CAPAIAN RESTRAT TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN MAJU BENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAUO INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAUO INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Pendidikan Bagi Koperasi jika Usaha Koperasi juga Usaha Koperasi Kategori Koperasi Kategori Koperasi	Pendidikan dan latihan Pendidikan Bagi Koperasi jika Usaha Koperasi juga Usaha Koperasi Kategori Koperasi Kategori Koperasi	-	20 Orang	201.966.700,00		201.966.700,00			-	Peningkatan Ekonomi	-		201.966.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	
	2.17.06.2.01.01	Pengabdian Pemahaman dan Peningkatan Penguasaan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					20 Orang	201.966.700,00	Kab. Padang Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DAK NOM FISIK-PRCTUM	-	Peningkatan Ekonomi	-		201.966.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Koperasi	-	100 Persen	17.000.000,00		17.000.000,00			-	Peningkatan Ekonomi	-		17.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Peningkatan Koperasi yang Keunggulannya dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Koperasi yang Keunggulannya dalam Daerah Kabupaten Kota	-	3 Orang	17.000.000,00		17.000.000,00			-	Peningkatan Ekonomi	-		17.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	
	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Penguasaan Produk, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguasaan Kelembagaan, Penguasaan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Keunggulan Kabupaten Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Berdaya Saing, Mendapat Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguasaan Kelembagaan, Penguasaan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Keunggulan Kabupaten Kota		3 Unit Usaha	2.000.000,00		2.000.000,00	Kab. Padang Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ekonomi	-		2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	
	2.17.06.2.01.02	Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga dalam Peningkatan Tarif Harga Keluarga Melalui Kelembagaan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Tarif Harga Keluarga Melalui Kelembagaan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		3 Keluarga	15.000.000,00		15.000.000,00	Kab. Padang Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ekonomi	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH (UMK)	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMK)	-	70 Persen	137.251.380,90		137.251.380,90			-	Peningkatan Ekonomi	-		137.251.380,90	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Diakutkan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Diakutkan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-			17 Unit usaha	137.951.380,00				Pemulihan Ekonomi			144.768.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				1 Dokumen	122.768.700,00	Kab. Padang Lawas Utara, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-PK2UKM	-	Pemulihan Ekonomi			122.768.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.07.2.01.03	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				2 Unit Usaha	2.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ekonomi dan Pemulihan Ekonomi			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				10 Orang	13.182.680,00	Kab. Padang Lawas Utara, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ekonomi dan Pemulihan Ekonomi			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pemenuhan Pengembangan UMKM	-			100 Person	5.000.000,00							5.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				5 Unit usaha	5.000.000,00				Peningkatan Ekonomi dan Pemulihan Ekonomi			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2.17.08.2.01.01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemastaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemastaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				10 Unit Usaha	5.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ekonomi dan Pemulihan Ekonomi			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
J U M L A H								4.234.398.097,00							4.394.445.635,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program kerja Operasional merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 yaitu

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rp 999.943.000,-

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Rp 0

3. Program Hubungan Industrial

Rp 0

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Rp. 2.804.019.850,-

5. Program Pengawasan Koperasi dan Pemeriksaan Koperasi

Rp. 0 ,-

6. Program Penilaian Kerszehatan KPS/USP Koperasi

Rp. 0,-

7. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperaian

Rp. 189.984.800,-,-

8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Rp. 50.000.000,-

9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha MikroUMKM

Rp. 50.000.000,-

10. Program Perkembangan UMKM

Rp. 118.385.200,-

Jumlah Dana : 4.222.332.850,-

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran DiskOPukmNaker Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DiskopUkmNaker Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perumusan Kebijakan Tekhnis sesuai Kewenangan Bidang Koperasi,UMKM, dan Ketenagakerjaan
2. Melaksanakan Tugas dan melakukan Pembinaan di Bidang Koperasi,UMKM, dan Ketenagakerjaan
3. Memberikan Rekomendasi perizinan sesuai Kewenangan Bidang Koperasi,UMKM, dan Ketenagakerjaan
4. Melaksanakan Tugas- tugas lain yang di berikan oleh Bupati Sesuai Tugas dan Fungsinya

BAB V

PENUTUP

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan ketengakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Penetapan Rencana Kerja (Renja) sebagai umpan balik bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan terlaksananya Rencana Kerja.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja diharapkan dapat tercapai sepenuhnya, dan diharapkan juga merupakan acuan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Gunungtua, 31 Agustus 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



SAHRIZAL, SH

NIP. 19660222 198611 1 001